

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian suatu Negara atau pemerintah adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin, karena pada hakekatnya suatu pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (founding fathers) sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Begitu besarnya perhatian para perumus UUD 1945 terhadap ketimpangan ekonomi, sampai-sampai terdapat ayat yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Klausul tersebut berada pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.<sup>1</sup> Masyarakat fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dianggap sebagai kondisi ekstrim keterbelakangan kondisi perekonomian seseorang sehingga negara harus memberikan perhatian khusus.

---

<sup>1</sup> *FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA?*  
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/19908-fakir-miskin-dan-anak-anak-terlantar-dipelihara-oleh-negara> (diakses pada tanggal 17 April 2017)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia relatif masih sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada bulan september 2013 menggambarkan bahwa penduduk miskin di Indonesia jumlahnya cukup besar. Tercatat pada tahun 2013 berjumlah 28,556.93 ribu jiwa penduduk miskin dan pada Maret 2014 turun menjadi 28,280.03 ribu jiwa. Penduduk miskin merupakan penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Secara nasional, pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 860.000 orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak sekitar 47 juta jiwa atau sekitar 18,28 persen jumlah penduduk di Indonesia, selama lebih dari tiga decade Jawa Barat telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa.

Disamping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi, hampir tigaperempat dari industri-industri manufaktur non minyak berpusat di sekitar Jawa Barat. PDRB Jawa Barat pada tahun 2003 mencapai Rp.231.764 miliar (US\$ 27.26 Billion) menyumbang 14-15 persen dari total PDB nasional, angka tertinggi bagi sebuah Provinsi. Bagaimanapun juga karena jumlah penduduk

yang besar<sup>2</sup>. Akan tetapi, provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar ketiga adalah provinsi Jawa Barat pula.

Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan siapa yang berhak menikmati hasil-hasilnya. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan kini merupakan masalah pokok dalam pembangunan dan sasaran utama kebijakan di banyak negara<sup>3</sup>.

Dalam empat tahun terakhir, Jawa Barat menduduki ranking ketiga, dimana lebih dari 17% penduduk miskin Indonesia tinggal di provinsi yang mempunyai 19 daerah kabupaten dan 8 daerah kota ini. Berdasarkan data Statistik Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagian besar kelompok masyarakat miskin tersebut berada di daerah pedesaan

**Tabel 1.1**  
**Data Kemiskinan per Provinsi di Pulau Jawa**  
**Tahun 2011-2015**

PROVINSI	2011	2012	2013	2014	2015
DKI JAKARTA	363,42	365	364,94	403,38	383,795
JAWA BARAT	4648,63	4477,5	4339,84	4283,015	4460,675
JAWA TENGAH	5107,36	4977,4	4718,91	4699,135	4541,41
DI YOGYAKARTA	560,88	563,7	542,69	538,73	517,895
JAWA TIMUR	5356,21	5071	4818,54	4767,605	4782,545
BANTEN	690,49	650,55	669,48	636,015	696,535

Sumber : Bps Jabar (data diolah peneliti)

<sup>2</sup> Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat) diakses pada tanggal 30 mei 2017 pada pukul 08.00

<sup>3</sup> Michael P. Todaro. "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Jakarta: Erlangga. 2000), h177-178

Tabel dan gambar 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat. Menurut hasil dari Badan Pusat Statistik, 2011 - 2015 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat berfluktuatif cenderung menurun, Jawa Barat merupakan wilayah yang mempunyai penduduk miskin terbesar ketiga di pulau Jawa. pada tahun 2014 angka kemiskinan mencapai 4283,01 ribu jiwa lalu melonjak naik pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin melonjak naik menjadi 4460,65 ribu jiwa dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Jawa Barat meningkat sebesar 177,64 ribu jiwa penduduk. Jumlah ini masih tergolong cukup besar mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang menyumbang pendapatan Negara yang cukup besar. Dengan demikian perlu peningkatan kinerja dari pemerintah provinsi untuk lebih memperhatikan dan peduli terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu sehingga pada masa yang akan datang tercipta perubahan terhadap perkembangan provinsi Jawa Barat, sehingga menjadikan provinsi percontohan di Indonesia.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling sulit dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Secara umum, orang-orang miskin itu biasanya lebih rentan terhadap berbagai penyakit sosial, mulai dari gaya hidup menggelandang yang kurang manusiawi, ketergantungan obat bius, kekerasan rumah tangga, masalah-masalah kesehatan, kehamilan remaja diluar nikah, buta huruf, pengangguran, dan prestasi pendidikan yang rendah.

Anggota keluarga miskin biasanya memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan tindakan kriminal, dan mereka juga lebih rapuh sehingga lebih mudah dijadikan korban kriminalitas.<sup>4</sup>

Banyak persoalan-persoalan yang timbul akibat dilanda kemiskinan. Begitu pula dalam bidang sosial, sering terjadi tindakan pidana pemerasan, perampokan dan tindak kejahatan lainnya. Persoalan tersebut disebabkan oleh kegelisahan masyarakat di dalam menjalani kehidupan di bawah garis kemiskinan<sup>5</sup>

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Salah satu faktor penyebab kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat pendidikan yang merupakan kebutuhan manusia yang penting dikarenakan mempunyai tugas untuk mempersiapkan sumber daya manusia sebagai pembangunan bangsa dan negara.

Jika dunia pendidikan tidak diperhatikan secara maksimal, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau mengalami

---

<sup>4</sup> N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1* (Alih Bahasa oleh Haris Munandar), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), H. 587

<sup>5</sup> Mansour fakih, *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*, (Yogyakarta : insist Press, 2001), H.75

kebodohan bahkan secara sistematis<sup>6</sup>. Banyak orang miskin mengalami kebodohan karena itu penting untuk memahami bahwa kemiskinan bias mengakibatkan kebodohan dan kebodohan jelas identic dengan kemiskinan.

Hubungan Pendidikan dan kemiskinan sangat berpengaruh, karena semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang, maka keahlian juga akan meningkat yang mengakibatkan pada produktivitas kerja seseorang. Karena Pendidikan merupakan sarana untuk menghapus kebodohan dan juga kemiskinan. Salah satu indikator untuk mengukur program pembangunan di bidang Pendidikan adalah tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) di suatu daerah.

**Tabel 1.2**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Jawa Barat**  
**2011-2015 (dalam persen)**

Tahun	APK_SD	APK_SMP	APK_SM	APK_PT
2011	<b>101.09</b>	<b>87.96</b>	<b>56.09</b>	<b>13.87</b>
2012	<b>103.28</b>	<b>87.44</b>	<b>64.90</b>	<b>13.83</b>
2013	<b>106.75</b>	<b>85.26</b>	<b>60.12</b>	<b>19.62</b>
2014	<b>106.98</b>	<b>87.50</b>	<b>68.55</b>	<b>21.70</b>
2015	<b>109.42</b>	<b>90.07</b>	<b>70.23</b>	<b>17.76</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (diolah peneliti)

Pada Tabel 1.2. dengan menggunakan data Angka Partisipasi Kasar Provinsi Jabar, dapat dilihat cenderung meningkat setiap tahunnya. Untuk APK

---

<sup>6</sup> Van indra Wiguna, *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

pada jenjang SD menunjukkan kecendurengan meningkat setiap tahunnya . dari 101.09 persen di tahun 2011 menjadi 109.42 persen pada tahun 2015. Untuk APK tingkat SMP juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 87,96 persen pada tahun 2011 menjadi 90.07 persen pada tahun 2015 begitupun juga untuk APK tingkat SMA mengalami cenderung kenaikan setiap tahunnya. Pada jenjang perguruan tinggi terbilang relatif rendah yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain biaya Pendidikan yang terbilang tinggi , letak geografis perguruan tinggi yang relatif jauh dari pemukiman penduduk terdekat dan kurangnya sarana dan prasarana.

Salah satu instrumen dari kebijakan pemerintah daerah yang dapat menanggulangi kemiskinan di Jawa Barat yaitu dengan pengaturan distribusi dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), yang didalamnya mencakup sumber penerimaan daerah dan belanja daerah, tetapi juga pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang salah satunya bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan manusia Indonesia seutuhnya dapat direalisasikan melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik yaitu Pendidikan. Dengan meningkatkan alokasi pemerintah di sektor publik tersebut maka akan meningkatkan pembangunan manusia yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Selama kurun waktu 2009-2015 APBD Jawa Barat telah mengalami kenaikan, dimana jika pada tahun 2005 belanja daerah baru mencapai Rp 10

triliun, namun pada tahun 2010 belanja daerah telah mencapai Rp 25 triliun naik sejumlah duakali lipat dari tahun 2009.

**Tabel 1.3**

**Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Seluruh Kabupaten/Kota Se Jawa Barat Menurut Komponen Pengeluaran (Ribu Rupiah)**

<b>TAHUN</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>2010</b>	22.363.579.125	11.884.217.394	37.805.521.288
<b>2011</b>	24.548.647.636	15.670.620.250	44.757.768.756
<b>2012</b>	26.824.244.861	19.539.638.317	52.654.093.392
<b>2013</b>	30.191.475.661	24.886.560.873	61.840.196.528
<b>2014</b>	33.256.225.518	28.792.505.323	71.997.385.339
<b>2015</b>	40.372.696.424	32.568.107.994	73.699.529.865

Sumber : BPS Jabar (data diolah peneliti)

Anggaran belanja pemerintah setiap tahun mengalami peningkatan, seperti yang terlihat dalam Tabel 1.2, pada tahun 2010 total belanja pemerintah dalam APBD mencapai Rp 37.805.521.288 (ribu rupiah) dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2015 sejumlah Rp 73.699.529.865 (ribu rupiah). Meningkatnya belanja pemerintah berdampak baik bagi provinsi Jawa Barat.

Idealnya, peningkatan pengeluaran pemerintah dibiayai dari peningkatan penerimaan daerah. Pemerintah daerah memerlukan banyak pendapatan daerah untuk digunakan pada belanja daerah perihal mengatasi masalah

pengangguran, kemiskinan, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Belanja pemerintah daerah terutama pada sektor pendidikan akan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur atau prasarana dan sarana publik yang akan berperan positif dalam menurunkan angka kemiskinan. Belanja pemerintah di bidang ini membantu penduduk miskin untuk dapat akses ke Pendidikan dan pelayanan kesehatan. Tertama jika belanja tersebut diarahkan kepada pemberian subsidi bagi golongan penduduk yang kurang mampu, mereka akan memanfaatkan hal tersebut.

Berdasarkan uraian fakta diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dan tingkat Pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan di provinsi Jawa Barat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan bahwa kemiskinan di Jawa Barat dapat dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya adalah :

1. Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Barat
2. Belanja Pemerintah Daerah Sektor Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Barat
3. Tingkat Pendidikan dan Belanja Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan di Provinsi Jawa Barat

### **C. PEMBATAAN MASALAH**

Melihat begitu luasnya ruang lingkup dari penelitian ini, menyebabkan peneliti mengalami kesulitan dalam penelitian ini. Kesulitan ini melingkup dana, keterbatasan waktu dan tenaga. Oleh Karena itu peneliti hanya membatasi ruang lingkup ini pada masalah: “Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung, Bekasi, Karawang, Garut , Bogor, Cirebon, kota Bandung, kota Bekasi, kota Cirebon dan kota Bogor pada tahun 2011-2015”.

### **D. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan kemiskinan di provinsi Jawa Barat ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Barat ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara belanja pemerintah sektor Pendidikan dan tingkat Pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Barat ?

### **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan teoritis**

Dengan ini penelitian dapat menambah pengetahuan baru dan informasi dalam bidang ekonomi khususnya mengenai seberapa besar

pengaruh belanja pemerintah sektor Pendidikan dan tingkat Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

## **2. Kegunaan praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan manfaat bagi beberapa pihak, yakni sebagai berikut :

### **a. Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan, serta mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi Kemiskinan di 6 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Jawa Barat.(Kab. Bandung, Bekasi, Karawang, Garut , Bogor, Cirebon, kota Bandung, kota Bekasi, kota Cirebon dan kota Bogor)

### **b. Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan di dalam menyusun model perencanaan pengeluaran pemerintah daerah, dengan melibatkan faktor-faktor yang dinilai mempengaruhi pengurangan kemiskinan di 6 kabupaten dan 4 kota pada provinsi Jawa Barat (Kab. Bandung, Bekasi, Karawang, Garut , Bogor, Cirebon, kota Bandung, kota Bekasi, kota Cirebon dan kota Bogor pada). Dengan begitu, juga diharapkan agar tungkat pendidikan dapat optimal, sehingga kemiskinan pun dapat mencapai target yang ditetapkan.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan baru bagi masyarakat mengenai masalah kemiskinan, khususnya yang terjadi di 6 kabupaten dan 4 kota yang ada di provinsi Jawa Barat (Kab. Bandung, Bekasi, Karawang, Garut , Bogor, Cirebon, kota Bandung, kota Bekasi, kota Cirebon dan kota Bogor). Dengan begitu diharapkan adanya kesadaran masyarakat betapa pentingnya Pendidikan untuk mengentaskan kemiskinan.